

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri tersebut, selanjutnya Halim (2007:19) menyatakan terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi.

Salah satu tujuan dari pengelolaan keuangan daerah yakni Tanggung jawab (*accountability*) dan pemenuhan kewajiban keuangan. Terkait dengan tanggung

jawab, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab mencakup keabsahan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan keuangan dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua. Kemudian terkait dengan pemenuhan kewajiban, keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang yang telah ditentukan (Devas dalam Farci 2012: 14-15).

Sehingga pemerintah dalam pengelolaan keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan hal-hal yang terkait dengan keuangan. Sebab menurut Roshanti, Sujana dan Sinarwati (2014) Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut memiliki nilai. Nilai tersebut diantaranya adalah keterandalan dan ketepatwaktuan. Keterandalan dan ketepatwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid sedangkan ketepatwaktuan merupakan

tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi itu kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Nilai informasi yang asimetris tentunya akan memberikan dampak kurangnya kredibilitas dari Pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah dituntut harus menyajikan laporan keuangan dengan muatan informasi yang memiliki nilai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sebagaimana pernyataan Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai dan juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut. Lebih lanjut dikatakan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) bahwa kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Kriteria ini secara umum disebut karakteristik kualitatif (*qualitative characteristics*) atau kualitas (*qualities*) informasi.

Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun

2010. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 71 tahun 2010 yakni (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Terciptanya laporan keuangan yang memiliki nilai informasi yang baik tentunya harus ada dukungan dari sistem informasi yang digunakan. Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi akan memberikan dampak baik bagi nilai informasi laporan keuangan. Secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik, diharapkan dapat menghasilkan pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sehingga keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan juga dapat meningkat (Widjajanto dalam Sembiring, 2013).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hamzah dalam Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) bahwa pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi akan mempermudah akses dan juga bermanfaat bagi nilai informasi laporan keuangan pada Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi atau dalam Pemerintahan lebih dikenal dengan SIMDA. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas, dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam suatu sistem informasi akuntansi, tidak ada aktivitas umum yang ditambah atau dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Sistem masih memasukkan pengendalian-pengendalian atas keakurasian data. Sistem juga menghasilkan laporan-laporan dan informasi lainnya.

Aplikasi sistem informasi manajemen daerah merupakan program aplikasi komputer yang terintegrasi dan dapat membantu proses administrasi pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. SIMDA terdiri dari banyak aplikasi terpisah yang dapat didistribusikan di setiap SKPD dengan sistem *database* terintegrasi, sehingga outputnya dapat dipergunakan oleh pimpinan daerah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Di sisi lain pihak legislatif dapat menggunakannya untuk melakukan monitoring terhadap kinerja pemerintah daerah. SIMDA merupakan salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan,

pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan (Dian, 2013: 9).

Terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan nilai informasi keuangan, Pemerintah Kota Gorontalo semenjak Tahun 2014 mampu untuk mendapatkan predikat baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yakni wajar dengan pengecualian, tidak terkecuali untuk laporan keuangan tahun 2015-2019 yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian secara konsisten.

Namun demikian dari opini tersebut masih diperoleh informasi dari BPK 2020 bahwa beberapa informasi yang disebutkan belum sesuai dengan standar pelaporan yang diharapkan, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah kota gorontalo diantaranya pengelolaan Kas, Piutang, dan Persediaan. Pencatatandalam Buku Kas Umum (BKU) dan penyetoran pendapatan tidak tertib, piutang sewa berlarut-larut, Aset Tetap tidak dilengkapi informasi yang memadai seperti status, lokasi, luasan dan ukuran volume, sebagian fisiknya tidak dapat ditelusuri, tidak didukung bukti kepemilikannya yang memadai, serta di catat secara gelondongan.

Selain itu Menurut Rahmadi, 2020: 6) BPK juga memberikan peringatan ataupun notifikasi terkait dengan aspek kepatuhan pendapatan, dimulai dari pemungutan retribusi tanpa SKRD, penggunaan langsung hasil pemungutan, dan potensi pendapatan tidak dipungut, karena itu mempengaruhi pertanggung jawaban belanja BOS yang terancam tidak tertib dan juga hasil realisasi melebihi nilai kontrak.

Capaian laporan LKPD yang baik tidak menjamin adanya tindakan yang kurang terpuji, hal ini dapat dilihat dari adanya fenomena dimana terdapat banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara yang dalam hal ini mereka telah diaudit oleh BPK atas pengelolaan keuangannya. Hal ini sebagaimana dikutip dari situs berita online bahwa di Kota Gorontalo yang melibatkan mantan Kepala Dinas PU yakni kasus korupsi 7 ruas jalan di Kota Gorontalo. Hal ini telah diasiasi oleh pemerintah melalui kerja sama dengan Bank SulutGO menggunakan aplikasi Kasda Online yang terintegrasi dengan SIMDA. Namun kenyataannya hal ini masih mengalami berbagai kendala sebagaimana menurut Kumurur (2019) bahwa masih kurangnya pemahaman pengguna dalam menggunakan Aplikasi Kasda Online Versi 2.0 Bank SulutGo, Masih ada sebagian kebutuhan Pemerintah Daerah yang belum terpenuhi pada Aplikasi Kasda Online Versi 2.0 Bank SulutGo. Serta belum semua Instansi tersedia jaringan internet. Masalah-masalah tersebut menjadi suatu kendala teknis yang apabila tidak mendapat perhatian maka akan berdampak pada buruknya pengelolaan keuangan yang telah bertransformasi menjadi pengelolaan keuangan online.

Permasalahan terkait informasi keuangan dapat dilihat dari sulitnya server dari Pemerintah Kota Gorontalo. Hal ini harusnya segera di perbaiki karena dapat berdampak pada pengelolaan keuangan yang menjadi kurang baik. Berbagai hal-hal terkait dengan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Sistem informasi (SIMDA) sebagai wadah yang dapat membantu Pemerintah akan lebih baik jika sumber daya manusia (SDM) yang menggunakannya pun memiliki keterampilan yang baik. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Muhamad (2014) bahwa

penerapan SIMDA yang sering terjadi antara lain *software* SIMDA harus berjalan pada *platform Windows 7*, hal ini disebabkan SIMDA akan berjalan tidak stabil apabila hanya diterapkan pada *WindowsXP*, kemudian *server database* harus menggunakan *Microsoft SQL Server 2000* yang hanya bisa dijalankan pada *Windows Server 2003* yang sudah terlalu banyak kelemahan dan mempengaruhi kinerja dari *database server* itu sendiri sementara jika dijalankan pada *Windows Server 2008* mengharuskan perubahan yang memakan banyak waktu, selain itu masalah dari segi perangkat adalah jaringan yang koneksinya terputus ketika user akan melakukan koneksi ke *server* SIMDA.

Penelitian ini berangkat dari beberapa penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Arina Roshanti (2014) yang meneliti tentang pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan TI, dan sistem Pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan Keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada lokasi penelitian serta alat analisis yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka formulasi judul yang penulis tuangkan dalam tulisan ini adalah **pengaruh penggunaan teknologi informasi (SIMDA) terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yakni

1. Adanya beberapa temuan BPK yang masih harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Gorontalo terkait dengan laporan keuangan dan masalah pengelolaan aset.
2. Penggunaan sistem masih kurang optimal yakni masih lambatnya respon dari server situs resmi Pemerintah Kota Gorontalo terutama dalam pemanfaatan SIMDA. Kemudian integrasi SIMDA dengan Kasda Online Bank SulutGo kurang optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan teknologi informasi secara parsial maupun simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknologi informasi secara parsial maupun simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya *agencytheory* terutama tentang penggunaan teknologi informasi dan nilai informasi pelaporan keuangan. Bagi peneliti lain dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti-peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kota Gorontalo penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan nilai informasi pelaporan keuangan demi tercapainya laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan masukan dalam penerapan penggunaan teknologi informasi yang efektif dimasa yang akan datang.